

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman untuk Menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.” Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013, SAP berbasis akrual adalah “SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran.”

Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintah sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara professional. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 10 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan kerja hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Sesuai dengan peraturan diatas yang berlaku bahwa setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018:10), Pengertian

good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* (dalam Nofianti, 2015:50), mendefinisikan *good governance* sebagai berikut:

“*Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen Pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti computer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software data yang lebih terpenting lagi adalah orang.

Komponen laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan. LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mana sebagai auditor independent yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui Tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut. Selain penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian internal, bukti-bukti yang memadai dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi 2016:12).

LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari BPK. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya laporan keuangan suatu entitas pemerintahan daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang Undang No. 15 tahun, 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa

(1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Opini wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Opini Tidak Wajar (TP), dan (4) pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Menurut (Bastian,2010) terdapat lima jenis pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan Bahasa perkelas, (3) pendapat wajar dengan pengecualian, (4) pendapat tidak wajar, dan (5) pernyataan tidak memberikan pendapat (Mahmudi 2016:13)

Pengelolaan keuangan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama karena ketidak seragaman format laporan keuangan dan kemungkinan Tingkat kesalahan penghajian laporan keuangan lebih tinggi. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong setiap pemerintah daerah untuk ikut serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi menggunakan jaringan internet maupun jaringan internet untuk Pengelolaan keuangan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama karena ketidak seragaman format laporan keuangan dan kemungkinan Tingkat kesalahan penghajian laporan keuangan lebih tinggi mempermudah pengelolaan keuangan dan untuk menyeragamkan laporan keuangan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Mahmudi 2016:20)

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).”Setelah 12 tahun Pemerintah kota Palembang berhasil meraih predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses pengadaan *meubelair* pada dinas Pendidikan menunjukkan terdapat indikasi pengaturan harga, spesifikasi diarahkan kepada produk dan rekanan tertentu, serta pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Keuangan, Pemerintah Kota Palembang menyajikan Belanja Modal jalan, Irigasi dan jaringan. keefektifitasan sistem pengendalian intern yang mendasar yaitu Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses pengadaan *meubelair* pada dinas Pendidikan menunjukkan terdapat indikasi pengaturan harga, spesifikasi diarahkan kepada produk dan rekanan tertentu, serta pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrakusulan kegiatan tidak diverifikasi secara memadai dan pemaketan pekerjaan tidak memadai, pemilihan penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, pengawasan kegiatan yang tidak melibatkan konsultan sebagai pengawas eksternal dan kekurangan volume pekerjaan atas 211 paket pekerjaan (sumber : sumsel.bpk.go.id) . Sebagaimana pada tabel 1.1

Tabel 1. 1
Opini BPK atas LKPD Wilayah Kota Palembang (2018-2022)

No	Keterangan	Opini
1.	Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	Tahun 2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : bpkp.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 Laporan keuangan Kota Palembang, setelah 12 tahun pemerintah kota Palembang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akhirnya pada tahun 2022 di berikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Fenomena yang terjadi berdasarkan daftar temuan BPK yang sesuai hasil pemeriksaan atas proses pengadaan meubelair pada Dinas Pendidikan menunjukkan terdapat indikasi pengaturan harga, spesifikasi diarahkan kepada produk dan rekanan tertentu, serta pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak pada Laporan keuangan Kota Palembang, adapun faktor lain terdapat pada catatan atas laporan keuangan, Pemerintah kota Palembang menyajikan Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan menunjukkan terdapat penyimpangan dan ketidakefektifan sistem pengendalian intern yang mendasar yaitu usulan kegiatan tidak diverifikasi secara memadai dan pemaketan pekerjaan tidak memadai, pemilihan penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualikasi, pengawasan kegiatan yang tidak melibatkan konsultan sebagai pengawas eksternal dan kekurangan volume pekerjaan atas 211 paket pekerjaan yang menyebabkan efek samping mulai dari kuliatas laporan keuangan hingga berdampak merugikan keuangan negara yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pihak instansi dalam melaksanakan kegiatan. Sumber: (sumsel.bpk.go.id)

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan pada poin 3.1, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara parsial ?
2. Apakah terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang secara simultan ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah dalam pembahasannya agar penulisan proposal skripsi ini dapat dilakukan dengan lebih terarah dan dapat dicapai tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Batasan masalah yang ada pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi .
2. Unit analisis yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Responden yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah pegawai OPD Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat langsung dalam proses Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance* dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang secara parsial.

2. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang didapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan kota Palembang.
- b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai dengan pengaruh standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang didapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Kota Palembang, hasil penelitian ini menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah.
- b. Bagi Pembaca, dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.